

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**



**TUGAS AKHIR**

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN  
PENYETORAN PPH PASAL 21 DI BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA (BKN)**

Diajukan oleh:

**ANDREAS SIMANJUNTAK**  
**1731230008**

**JAKARTA**  
**(2020)**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : Andreas Simanjuntak  
Nim : 171230008  
Program Studi : D-III Manajemen Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : EVALUASI PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN  
PENYETORAN PPH PASAL21 DI BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis benar-benar telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Laporan Praktek Kerja Lapangan (LPKL), ini merupakan hasil karya sendiri

Demikian pernyataan ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan penulis bersedia dikenakan saksi yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia

Jakarta 24 Agustus2020

Hormat Saya



(Andreas Simanjuntak)

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

Nama :Andreas Simanjuntak  
NIM :171230008  
Program Studi :D-III Manajemen Perpajakan  
Judul Tugas Akhir :EVALUASI PELAKSANAAN PEMOTONGAN  
DAN PENYETORAN PPH PASAL21 DI BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

Disetujui untuk diajukan sidang ujian pendadaran

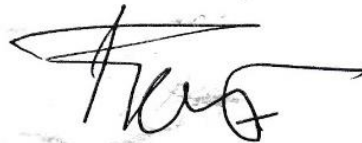
Jakarta, 24 Agustus 2020

Pembimbing materi



(Banggas Sitorus,S.E.M.M)

Pembimbing teknis



(Fharel M Hutajulu,SE.,MM.,AK)

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**PENGESAHAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANAGAN**

Nama : Andreas Simanjuntak  
NIM : 171230008  
Program Studi : D-III Manajemen Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : EVALUASI PELAKSANAAN PEMOTONGAN  
DAN PENYETORAN PPH PASAL21 DI  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

Diterima dan di sahkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya

Jakarta, 24 Agustus 2020

**Panitia Penguji :**

1. Frangky Yosua Sitorus, SE.,MM., AK (Ketua)
2. Lenny Panggabean, SE.,M.AK., AK (Sekretaris)
3. Banggas Sitorus, SE.,MM (Anggota)

.....  
.....  
.....

Mengetahui :



(Juaniva Sidharta, S.E.M.SI)

Ketua Program Studi



(Desideria Regina, SE.MM)

## RINGKASAN

### ANDREAS SIMANJUNTAK, **EVALUASI PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21 DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Tujuan LPKL untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPh pasal 21 atas setiap pegawai yang dikenakan pemotongan pajak pada Badan Kepegawaian Negara dan mengetahui mekanisme penyetoran atas setiap pemotongan

Pengertian pajak penghasilan menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pajak Penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:9) adalah Pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek luar negeri.

Tarif pemotongan pajak sesuai pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut: sampai dengan 50 juta adalah 5% 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15% 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25% diatas 500 juta adalah 30%

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan pendapatan wajib pribadi penerapan tarif PTKP penerima upah mingguan, harian, atau berstatus tidak tetap, diatur dalam PMK No.102/PMK.010/2016 tarif PTKP yang ditetapkan:

1. Pajak Orang pribadi sejumlah Rp 54.000.000
2. Tambahan Wajib Pajak yang sudah menikah sebesar Rp 4.500.000
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak istri yang mendapatkannya digabung dengan suami sebanding Rp 54.000.000
4. Tambahan maksimal tiga orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat sejumlah Rp 4.500.000

Proses pengolahan data rekap gaji untuk perhitungan, pelaporan PPh 21 pegawai Badan Kepegawaian Negara bersumber dari data Januari – Desember 2019 Data rekap gaji 2019 yang di proses dan di buat secara manual yang bersumber dari data input gaji yang dilakukan setiap bulannya dan data penggajian tersebut menjadi sumber yang kemudian di muat dalam Surat perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya akan di kirimkan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN). Selanjutnya akan diolah kembali dengan aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat)

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pemotongan dan penyeteroran PPh pasal 21 atas Pegawai Badan Kepegawaian Negara tahun

2019 dasar pemotongan dan penyetoran dengan penghasilan kena pajak  
yaitu sebesar penghasilan netto dikurangi penghasilan Tidak Kena Pajak

Jakarta, 24 Agustus 2020

(Andreas Simanjuntak)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas dasr rahmat dan karuniaNya yang telah menyanggupkan saya dalam menyelesaikan Tugas ahir ini tepat pada waktunya dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Pemotongan Dan Penyetoran PPh Pasal 21 di Badan Kepegawaian Negara (BKN)”

Tugas ahir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Jurusan Managemen Perpajakan Universitas Kristen Indonesia

Selama mengikuti pendidikan DIII Manajemen Perpajakan sampai dengan proses penyelesaian Tugas Akhir, berbagai piak telah memberikan fasilitas, membantu, membina dan membimbingpenulisan untuk itu khususnya kepada:

1. Kedua Orangtua beserta kakak, abang dan adik saya yang telah menjadi penyemangat dan memberikan dukungan sejak saya mulai kuliah hingga pada pembuatan tugas akhir ini.
2. Ibu Juaniva Sidharta,S.E.M.SI Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Desideria Regina,SE.MM Selaku Kepala Program Pendidikan D3 Manajemen Perpajakan Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Banggas Sitorus,S.E.M.M Selaku Dosen Pembimbing Materi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam menyusun Tugas Akhir ini dengan baik.
5. Bapak Fharel M Hutajulu,SE.,MM.,AK Selaku Dosen Pembimbing Teknis yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam menyusun Tugas Akhir ini dengan baik.



6. Seluruh Dosen yang telah mendidik dan memberikan berbagai ilmu serta pengetahuan sebagai bekal saya di masa yang akan datang
7. Kepada Pihak Badan Kepegawaian Negara yang telah bersedia memberikan tempat untuk saya dalam melakukan Praktek Kerja Lapangan dan membantu menulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
8. Kepada Keluarga Besar Pecinta Alam Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (PALAMA FE-UKI) yang selalu memberikan doa, dukungan dan Dukungan Kepada Penulis
9. Seluruh teman seperjuangan FE-UKI 2017 yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini

Penulis menyadari, Tugas Akhir ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Kareba itu kritik dan saran yang membangun akan di terima dengan senang hati, mudah-mudahan keberadaan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita, khususnya tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemotongan Dan Penyetoran PPh Pasal 21 di Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Jakarta, 24 Agustus 2020

Andreas Simanjuntak

## DAFTAR ISI

### *Halaman*

LEMBAR PERNYATAAN .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
RINGKASAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan .....	1
B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan.....	3
C. Ruang lingkup dari batasan kerja Praktek Kerja Lapangan .....	4
D. Waktu dan Lokasi Praktek Kerja Lapangan.....	5
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	
A. Pajak .....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak .....	7
3. Asas-asas pemungutan Pajak.....	7

4. Syarat Pemungutan Pajak.....	8
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
6. Tarif Pemungutan Pajak.....	11
a) Tarif Pajak Penghasilan untuk WP orang pribadi.. .....	13
7. Dasar Hukum Tarif Pajak Penghasilan .....	13
a) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk WP Badan.....	13
8. Hambatan Pemungutan Pajak .....	14
9. Pengelompokan Pajak.....	15
10. Tarif Pajak.....	16
11. Sanksi Pajak.....	18
12. Hukum Pajak.....	20
B. Konsep Pajak Penghasilan.....	21
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	21
2. Subjek Pajak Penghasilan .....	22
3. Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	23
4. Objek Pajak Penghasilan.....	24
a. Penghasilan .....	24
b. Objek Pajak Penghasilan .....	25
5. Tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	27
a. Tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	27
C. Pajak Penghasilan 21.....	29
1. Pengertian Pajak Penghasilan 21.....	29
2. Wajib Pajak penghasilan 21 .....	34

3. Tidak termasuk wajib pajak Penghasilan 21.....	34
4. Objek Pajak Penghasilan 21.....	36
a. Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21.....	36
b. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 ..	37
c. Penghasilan kena Pajak .....	38
d. Tarif Pajak Penghasilan pasal 21.....	38
D. Perhitungan Pemotongan PPh pasal 21.....	43
1. Pegawai Tetap.....	43
2. Penerima Pensiun Berkala.....	46
3. Pegawai tidak tetap.....	47
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah Singkat.....	49
B. Lahirnya BKN.....	51
C. Struktur umum Organisasi.....	52
 <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Pengolahan Data Rekap Gaji untuk Pemotongan dan Pemungutan PPh pasal 21 Badan Kepegawaian Negara.....	54
B. Analisis dan Pembahasan Masalah.....	57
1. Prosedur penghitungan PPh pasal 21 pada terhadap pegawai Badan Kepegawaian Negara.....	57
C. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	59

1. PTKP Tidak kawin/individu .....	59
D. Hasil Evaluasi .....	59
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

1. Tabel ilustrasi jenis tarif Progresif.....	17
2. Tabel ilustrasi jenis tarif Degresif.....	17
3. Tabel tarif Progresif PPh 21 .....	38
4. Tabel tarif berdasarkan jenis penghasilan .....	39
5. Tabel tarif PPh 21 yang menjadi beban APBN dan APBD .....	39
6. Tabel contoh perhitungan PPh 21 karyawan tetap .....	45
7. Tabel tarif PPh 21 pegawai tidak tetap .....	48
8. Tabel daftar gaji selama satu tahun dan pajak terhutang.....	63

## DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Umum Organisasi Badan Kepegawaian Negara.....63